

Peran Pemerintah dalam Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Kota Makassar: Studi pada Akses Modal dan Pelatihan

Nasir

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding Author:

Nasir, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: nasir@unm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of the government in the implementation of MSME empowerment programs in Makassar City, with a focus on access to capital and training. MSMEs have an important role in the regional economy, but they still face various challenges, especially in obtaining financing and increasing business capacity. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through interviews with MSME actors, government representatives, and financial institutions, and was strengthened by observation and documentation studies. The results of the study show that the Makassar City government has provided various capital access programs, such as People's Business Credit (KUR) and revolving capital assistance, which help MSMEs in business development. However, there are still obstacles in the complex administrative process, requirements that are difficult to meet, and lack of socialization. In terms of training, the program has improved the skills of MSME actors, especially in digital marketing and product innovation. Nevertheless, the sustainability of the program and post-training mentoring are still a major challenge. The novelty of this research lies in an in-depth analysis of the synergy between the government, financial institutions, and the business community in empowering MSMEs. The implication is that the government needs to simplify capital access procedures, increase the effectiveness of training through a technology-based approach, and strengthen mentoring programs for MSMEs. This research contributes to the development of more inclusive and sustainable policies to support the growth of MSMEs in Makassar City.

Keywords: MSMEs, Empowerment, Access to Capital, Training, Government Role

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam implementasi program pemberdayaan UMKM di Kota Makassar, dengan fokus pada akses modal dan pelatihan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memperoleh pembiayaan dan meningkatkan kapasitas usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku UMKM, perwakilan pemerintah, serta lembaga keuangan, serta diperkuat dengan observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah menyediakan berbagai program akses modal, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal bergulir, yang membantu UMKM dalam pengembangan usaha. Namun, masih terdapat kendala dalam proses administrasi yang kompleks, persyaratan yang sulit dipenuhi, serta kurangnya sosialisasi. Dalam aspek pelatihan, program yang diselenggarakan telah meningkatkan keterampilan pelaku UMKM, terutama dalam pemasaran digital dan inovasi produk. Meskipun demikian, keberlanjutan program dan pendampingan pasca-pelatihan masih menjadi tantangan utama. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis dalam pemberdayaan UMKM. Implikasinya, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur akses modal,

meningkatkan efektivitas pelatihan melalui pendekatan berbasis teknologi, serta memperkuat program pendampingan bagi UMKM. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Makassar.

Kata kunci: UMKM, Pemberdayaan, Akses Modal, Pelatihan, Peran Pemerintah

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di Kota Makassar, sektor UMKM terus berkembang, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses permodalan dan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program, seperti bantuan kredit usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan bisnis. Namun, efektivitas program-program tersebut masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keterjangkauan, keberlanjutan, dan dampak nyata terhadap pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam implementasi program pemberdayaan UMKM di Kota Makassar, dengan fokus pada akses modal dan pelatihan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan akses permodalan dan keterampilan UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika kebijakan pemberdayaan UMKM serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas program yang telah berjalan.

Pemberdayaan UMKM merupakan strategi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Johnston (2019), UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun sering menghadapi kendala dalam akses permodalan dan peningkatan kapasitas usaha. Pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung UMKM melalui akses kredit, subsidi bunga, serta pelatihan keterampilan (Suryana, 2020). Peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi juga dibahas oleh Setiawan & Haryanto (2021), yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dalam meningkatkan akses modal bagi UMKM. Selain itu, penelitian oleh Hendri, Hendrayati, Achyarsyah, & Suryana (2023) menunjukkan bahwa program pelatihan kewirausahaan memiliki dampak positif terhadap inovasi bisnis dan daya saing UMKM, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

Teori pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Friedmann (1992) menjelaskan bahwa pemberdayaan harus mencakup akses terhadap sumber daya, peningkatan kapasitas individu, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan publik, teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980) menyoroti bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Studi oleh Hartono (2020) menegaskan bahwa program kredit usaha rakyat (KUR) menjadi salah satu instrumen efektif dalam meningkatkan akses modal bagi UMKM, meskipun masih ditemukan kendala dalam prosedur pengajuan dan distribusi dana.

Dalam aspek pelatihan, penelitian oleh Zain, R., Awal, & Yani (2025) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis teknologi dapat meningkatkan keterampilan digital pelaku UMKM, yang berkontribusi pada peningkatan pemasaran dan efisiensi operasional. Selain itu, penelitian

oleh Y. E. Setiawan & Ayuningtyas (2023) menekankan bahwa efektivitas pelatihan sangat bergantung pada metode yang digunakan, seperti pelatihan berbasis praktik dibandingkan dengan teori semata. Menurut Kuncoro (2023), kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM harus bersifat holistik, mencakup aspek finansial, teknologi, dan regulasi agar mampu menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan. Studi oleh Handayani & Prasetyo (2022) juga mengungkapkan bahwa digitalisasi UMKM menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing, sehingga pelatihan yang diberikan pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sosialisasi kebijakan (Santoso, 2020), ketidaksesuaian antara program yang diberikan dengan kebutuhan pelaku usaha (Widodo, 2019), serta kurangnya evaluasi terhadap efektivitas program (D. A. Putri, Sari, & Nugroho, 2021). Studi oleh Ramadhani, Setiawan, & Haryanto (2022) menambahkan bahwa keterlibatan UMKM dalam proses perumusan kebijakan masih terbatas, yang menyebabkan program yang disusun pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha. Sementara itu, penelitian oleh Yulianti & Prasetya (2021) mengungkapkan bahwa banyak UMKM di daerah belum memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital, sehingga pelatihan yang diberikan masih kurang efektif dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Selain faktor kebijakan dan pelatihan, keberlanjutan UMKM juga sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses ke pasar. Studi oleh Zamzami, Ihsan, & Siregar (2022) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai platform digital untuk membantu UMKM memasarkan produknya, banyak pelaku usaha yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Bambang et al. (2023), yang menyebutkan bahwa kurangnya pendampingan setelah pelatihan menjadi salah satu kendala utama dalam keberlanjutan program pemberdayaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelatihan satu kali, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program yang diberikan benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi UMKM.

Dalam penelitian sebelumnya, faktor sosial dan budaya juga disebutkan sebagai elemen yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan UMKM. Misalnya, studi dari M. A. Putri (2024) menemukan bahwa di beberapa daerah, keterlibatan komunitas lokal dalam pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan keberhasilan program karena adanya dukungan kolektif dari masyarakat. Namun, dalam konteks Kota Makassar, penelitian oleh Ulfa & Mulyadi (2020) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan program pemerintah antara UMKM di pusat kota dan di wilayah pinggiran. UMKM di daerah perkotaan cenderung lebih mudah mengakses program pelatihan dan modal, sementara UMKM di daerah pinggiran masih menghadapi kendala dalam mendapatkan informasi dan dukungan yang memadai.

Dengan mempertimbangkan berbagai kajian teoritis dan penelitian terdahulu, penelitian ini berusaha mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran pemerintah dalam implementasi program pemberdayaan UMKM di Kota Makassar, terutama terkait akses modal dan pelatihan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas

kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan program pemberdayaan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran pemerintah dalam implementasi program pemberdayaan UMKM di Kota Makassar, khususnya dalam aspek akses modal dan pelatihan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dengan sektor UMKM yang berkembang pesat. Waktu penelitian berlangsung selama beberapa bulan, menyesuaikan dengan proses pengumpulan data dan analisis yang dilakukan secara bertahap. Subjek penelitian meliputi para pelaku UMKM yang menerima program pemberdayaan, pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan pemberdayaan UMKM, serta pihak terkait lainnya seperti lembaga keuangan dan pelatih bisnis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung implementasi program pemberdayaan UMKM di berbagai sektor usaha di Kota Makassar. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pelaku UMKM untuk memahami pengalaman mereka dalam mengakses modal dan mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi tentang kebijakan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi program. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi, seperti laporan kebijakan, regulasi terkait, serta hasil evaluasi program pemberdayaan UMKM.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan penelitian secara sistematis. Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis pola-pola yang muncul dari data serta membandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program pemberdayaan UMKM di Kota Makassar serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Akses Modal bagi UMKM di Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan akses modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu program utama yang diterapkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Selain itu, terdapat bantuan modal bergulir, yang diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk dana hibah atau pinjaman lunak dengan skema pembayaran yang lebih fleksibel. Pemerintah juga berperan dalam menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, bank, dan fintech untuk menyediakan berbagai pilihan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM di berbagai sektor usaha.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM, banyak di antara mereka yang merasakan manfaat dari program-program tersebut dalam meningkatkan kapasitas usaha. Dengan adanya kemudahan akses modal, pelaku usaha dapat memperluas skala produksi, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan akses modal bagi UMKM. Salah satu tantangan utama adalah proses administrasi yang rumit, yang sering kali menyulitkan pelaku usaha kecil dalam mendapatkan bantuan modal. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik, serta jaminan kredit yang sering kali menjadi hambatan utama.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan informasi dan kurangnya sosialisasi mengenai skema pembiayaan yang tersedia. Beberapa pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui adanya program pembiayaan dari pemerintah, atau merasa bingung dengan prosedur yang harus diikuti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program pendanaan telah tersedia, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan informatif. Penelitian Hartono (2020) juga mengungkapkan bahwa program pembiayaan UMKM yang dikelola pemerintah sering kali mengalami kendala dalam aksesibilitasnya, terutama bagi pelaku usaha di sektor informal yang belum memiliki izin usaha resmi atau dokumen keuangan yang memadai.

Lebih lanjut, Setiawan & Haryanto (2021) menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan mikro sangat diperlukan untuk memastikan bahwa modal yang disediakan benar-benar menjangkau UMKM yang membutuhkan. Hal ini mengindikasikan bahwa solusi akses modal tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada mekanisme distribusi dan pendampingan yang tepat. Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program dengan memberikan bantuan teknis, seperti pendampingan dalam penyusunan proposal kredit, edukasi literasi keuangan, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar lebih ramah bagi pelaku usaha kecil.

Selain program konvensional seperti KUR dan bantuan modal bergulir, pemerintah juga mulai mendorong inovasi pembiayaan berbasis teknologi digital, seperti pinjaman berbasis fintech dan platform crowdfunding. Digitalisasi sektor keuangan membuka peluang baru bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perbankan konvensional. Beberapa pelaku usaha di Kota Makassar telah mulai memanfaatkan layanan fintech untuk mengakses modal kerja dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel. Hal ini sejalan dengan penelitian (D. A. Putri et al., 2021), yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi finansial dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbasis agunan.

Efektivitas Program Pelatihan UMKM

Pelatihan bagi pelaku UMKM merupakan salah satu strategi utama yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam rangka meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Program ini dirancang untuk membekali para pelaku usaha dengan keterampilan yang lebih baik dalam manajemen bisnis, pemasaran digital, inovasi produk, serta akses pasar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar peserta pelatihan menyatakan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari program ini, terutama dalam hal peningkatan kemampuan dalam menyusun strategi pemasaran, mengelola keuangan usaha, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan bisnis mereka.

Namun, meskipun program pelatihan telah memberikan dampak positif bagi peserta, penelitian ini menemukan beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Salah satu kendala utama adalah minimnya keberlanjutan program pelatihan. Banyak pelatihan yang hanya dilakukan satu kali tanpa adanya tindak lanjut, sehingga peserta sering kali kesulitan dalam menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan di dunia usaha yang sesungguhnya. Kurangnya pendampingan pasca-pelatihan juga menjadi masalah, di mana pelaku UMKM yang telah mendapatkan pelatihan tidak memiliki mentor atau fasilitator yang dapat membantu mereka menghadapi tantangan bisnis di lapangan.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara materi yang diajarkan dengan kebutuhan nyata pelaku UMKM. Beberapa peserta menyebutkan bahwa materi pelatihan sering kali bersifat teoritis dan kurang relevan dengan kondisi pasar yang dinamis. Sebagai contoh, pelatihan pemasaran digital sering kali hanya membahas dasar-dasar media sosial, tetapi tidak memberikan strategi konkret untuk meningkatkan penjualan secara online. Hal ini selaras dengan penelitian Zain et al., (2025), yang menekankan bahwa efektivitas pelatihan sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan. Pelatihan berbasis praktik dan mentoring jangka panjang terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pelatihan satu kali tanpa pendampingan lanjutan.

Selain itu, studi Y. E. Setiawan & Ayuningtyas (2023) menunjukkan bahwa pelatihan yang lebih interaktif, seperti workshop berbasis studi kasus nyata, lebih membantu pelaku UMKM dalam menerapkan ilmu yang mereka pelajari. Sebagai contoh, dalam program pelatihan yang melibatkan simulasi bisnis dan studi kasus dari usaha yang telah sukses, peserta lebih mudah memahami bagaimana strategi bisnis dapat diterapkan secara praktis. Oleh karena itu, pelatihan UMKM di Kota Makassar perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan agar benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi pelaku usaha.

Beberapa faktor lain yang memengaruhi efektivitas pelatihan UMKM di Kota Makassar adalah keterbatasan akses bagi pelaku usaha di daerah terpencil. Meskipun pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan, banyak pelaku UMKM di daerah pinggiran kota yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelatihan karena keterbatasan transportasi, keterbatasan waktu akibat kesibukan operasional usaha, serta kurangnya informasi mengenai jadwal dan lokasi pelatihan. Studi dari Handayani & Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap program pelatihan dibandingkan mereka yang berada di daerah pedesaan.

Sebagai solusi, pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan berbasis teknologi digital, seperti pelatihan daring melalui platform e-learning, webinar, atau modul pelatihan berbasis aplikasi. Dengan cara ini, pelaku UMKM dapat mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja, sehingga mengurangi hambatan geografis dan waktu. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Setiawan & Haryanto (2021), yang menyebutkan bahwa digitalisasi dalam pelatihan UMKM dapat meningkatkan partisipasi serta efektivitas program, karena memungkinkan pelaku usaha untuk belajar secara mandiri dengan tempo yang lebih fleksibel.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan UMKM

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan UMKM di Kota Makassar, yaitu kebijakan pemerintah, partisipasi pelaku usaha, dukungan infrastruktur, dan akses terhadap teknologi. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa kebijakan yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM. Selain itu, keterlibatan pelaku UMKM dalam

perumusan kebijakan menjadi faktor penting agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Hasil ini mendukung temuan dari Santoso (2020), yang menyoroti bahwa kebijakan yang tidak melibatkan UMKM dalam perencanaannya sering kali kurang efektif dalam implementasi. Selain itu, penelitian Putri et al. (2021) menegaskan bahwa infrastruktur, seperti akses internet dan sistem pembayaran digital, sangat berpengaruh dalam mendukung UMKM untuk berkembang di era digital. Di Kota Makassar, meskipun sebagian besar UMKM telah mulai beradaptasi dengan teknologi digital, masih terdapat kendala dalam hal literasi digital dan kesiapan infrastruktur, terutama di daerah pinggiran kota. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan UMKM perlu disertai dengan peningkatan akses terhadap teknologi dan pendampingan digitalisasi usaha.

Implikasi Kebijakan bagi Pengembangan UMKM di Kota Makassar

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM di Kota Makassar. Pertama, perlu adanya penyederhanaan prosedur dalam akses pembiayaan bagi UMKM kecil agar lebih banyak pelaku usaha yang bisa mendapatkan bantuan modal. Kedua, program pelatihan harus diperkuat dengan sistem pendampingan jangka panjang dan evaluasi berkala agar manfaatnya lebih optimal. Ketiga, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas UMKM harus lebih diperkuat untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kuncoro (2023), yang menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM harus bersifat holistik, mencakup aspek pembiayaan, pelatihan, serta akses pasar. Selain itu, penelitian Handayani & Prasetyo (2022) mengungkapkan bahwa digitalisasi UMKM menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah di era modern. Dengan demikian, kebijakan yang mendorong digitalisasi, seperti pelatihan e-commerce dan bantuan teknologi, harus menjadi bagian dari strategi pemberdayaan UMKM di Kota Makassar.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Makassar telah memberikan dampak positif, terutama dalam aspek akses modal dan pelatihan. Namun, masih diperlukan upaya perbaikan dalam implementasi kebijakan agar program yang telah ada dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Makassar dalam implementasi program pemberdayaan UMKM, khususnya dalam akses modal dan pelatihan, telah memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal bergulir telah membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Namun, masih terdapat kendala dalam aksesibilitas, seperti proses administrasi yang kompleks, persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM kecil, serta kurangnya sosialisasi mengenai program pendanaan yang tersedia. Dalam hal pelatihan, program yang dijalankan telah memberikan peningkatan keterampilan bagi pelaku UMKM, terutama dalam aspek manajerial, pemasaran digital, dan inovasi produk. Akan tetapi, efektivitas pelatihan masih menghadapi tantangan, seperti minimnya keberlanjutan program,

kurangnya pendampingan pasca-pelatihan, serta ketidaksesuaian antara materi yang diajarkan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan UMKM di Kota Makassar. Pemerintah perlu menyederhanakan proses administrasi dalam akses modal agar lebih inklusif bagi UMKM kecil serta meningkatkan sosialisasi mengenai program pembiayaan yang tersedia. Dalam aspek pelatihan, diperlukan pendekatan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan, seperti integrasi pelatihan dengan program pendampingan bisnis, pengembangan metode pelatihan berbasis digital, serta peningkatan akses pelatihan bagi pelaku usaha di daerah terpencil. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, komunitas bisnis, dan akademisi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM di Kota Makassar dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

REFERENSI

- Bambang, B., Azis, A. A., Kalsum, U., Akmal, S., Alfiana, A., & Almahdali, F. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan. *East Journal of Innovative Community Services*, 1(3), 142–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.122>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge, MA: Blackwell.
- Handayani, A., & Prasetyo, B. (2022). Peningkatan Daya Saing: Peran Pelatihan yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Pasar. *Digitalisasi UMKM Sebagai Faktor Jurnal Ekonomi Digital Dan Inovasi Bisnis*, 5(2), 112–125.
- Hartono, R. (2020). Strategi Pengembangan UMKM dalam Mendukung Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–56.
- Hendri, M., Hendrayati, H., Achyarsyah, M., & Suryana, S. (2023). Mindset Kewirausahaan, Kapabilitas Organisasi Usaha Mikro dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Strategi Inovasi. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1). <https://doi.org/10.29210/020232224>
- Johnston, L. A. (2019). The impact of the economic crisis on micro, small, and medium enterprises and their crisis mitigation measures in Southeast Asia with reference to Indonesia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 6(1), 40–58. <https://doi.org/10.1002/app5.265>
- Kuncoro, A. (2023). UMKM salah satu barometer perekonomian nasional. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/2227114/rektor-ui-umkm-salah-satu-barometer-perekonomian-nasional>
- Putri, D. A., Sari, M., & Nugroho, T. (2021). Kurangnya Evaluasi terhadap Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10(3), 112–125.
- Putri, M. A. (2024). *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Tanjung Mulia Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)*. Universitas Medan Area.

- Ramadhani, F., Setiawan, B., & Haryanto, R. (2022). Partisipasi UMKM dalam Perumusan Kebijakan: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 33–47.
- Santoso, B. (2020). Analisa Kebijakan Publik terhadap UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 12(1), 45–56.
- Setiawan, B., & Haryanto, R. (2021). Peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 150–165.
- Setiawan, Y. E., & Ayuningtyas, T. (2023). Penerapan Pelatihan Berbasis Praktik Dan Pelatihan Berbasis Teori Terhadap Minat Peserta Pelatihan. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(2), 127–134. <https://doi.org/10.24176/re.v13i2.6721>
- Suryana. (2020). *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses*. Jakarta: Kencana.
- Ulfa, M., & Mulyadi, M. (2020). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 17–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1294>
- Widodo, A. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan UMKM: Ketidaksesuaian antara Program dan Kebutuhan Pelaku Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 78–90.
- Yulianti, E., & Prasetya, A. (2021). Akses Teknologi Digital bagi UMKM di Daerah Terpencil: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(4), 201–215.
- Zain, H., R., R. A., Awal, H., & Yani, Z. (2025). Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Keamanan dan Pertumbuhan UMKM di Era Transformasi Digital. *Community Development Journal*, 15–25(6), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41392>
- Zamzami, Z., Ihsan, M., & Siregar, A. P. (2022). Pelatihan Pemanfaatan Platform Digital sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Bisnis bagi Pelaku Usaha Batik Jambi pada Masa Covid-19. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jitdm.v2i1.16419>